



Damkar, BPBD, Polres, PLN, Telkom Bersinergi Atasi Pohon Tumbang Berbahaya, Cuaca Ekstrem Picu Pohon Tumbang di Banyak Titik Baubau



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan bergerak cepat menangani insiden pohon tumbang yang terjadi di Kelurahan Sulaa pada Selasa pagi (20/01/2026). Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas karena posisi pohon yang menutupi sebagian badan jalan.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau Muhammad Mas-sad, SE M.Si, dalam keterangan persnya Selasa (20/01/2025) mengonfirmasi bahwa pihak-

Lanjut ke Hal: 7

Pimpin Upacara HKN Perdana 2026, Sekda Baubau La Ode Darussalam Tekankan Disiplin dan Efisiensi



Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menggelar upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) perdana di tahun 2026 pada Senin pagi (19/01/2026). Upacara yang berlangsung khidmat di halaman kantor Wali Kota tersebut ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si.

Dalam amanatnya, Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam menga-

jak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk merefleksikan makna mendalam dari Hari Kesadaran Nasional. Menurutnya, momen ini bukan sekadar rutinitas, melainkan pengingat bagi setiap abdi negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

La Ode Darus Salam juga menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi utama ASN. Ia mengingatkan kembali pesan Wali Kota Baubau saat pelantikan dirinya bahwa

penegakan disiplin adalah tugas prioritas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Tadi di awal apel, saya melihat masih ada teman-teman yang asik bercerita di belakang dan baru bergerak saat pemimpin upacara masuk lapangan. Mari kita hargai instruksi yang diberikan. Disiplin adalah bentuk kesadaran kita dalam bertugas," tegasnya.

Selain masalah disiplin, Sekda Kota Bau-

Lanjut ke Hal: 7

Sinergi Pemda Busel dan Batalion Lamaindo untuk Ketahanan Pangan, Naviruddin: Fish Finder dan Cold Storage, Masa Depan Baru Nelayan Busel

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, DT - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan (Busel), Naviruddin SE, menegaskan fokus pemerintah daerah pada penguatan ketahanan pangan melalui sektor perikanan.

Meski keterbatasan anggaran menjadi kendala, pihaknya tetap menyiapkan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan



Naviruddin SE

pengembangan industri perikanan di wilayah Busel.

Menurut Naviruddin,

sementara ini pemerintah daerah akan memprioritaskan kerjasama dengan pemerintah pusat.

"Kita buat dulu program dan konsepnya, baru kemudian kita ajukan ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran," ujarnya.

Selain itu, Naviruddin juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak militer, khususnya Batalion Lamaindo, yang

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buteng Azhari Serahkan 250 Pasang Seragam Pada BKMT dan Kelompok Majelis Taklim Nurul Yakin



Laporan: Komaruddin

BUTON TENGAH, BP-Bupati Buton Tengah, Azhari, didampingi Ketua TP-PKK Umi Noranah

Azhari bersama Camat Mawasangka, menyerahkan 250 pasang seragam kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Kelompok Majelis Taklim

di Masjid Nurul Yakin, Kecamatan Mawasangka, Senin (19/1/2025).

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pe-

Lanjut ke Hal: 7

Gubernur Sultra ASR Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi dan Fungsional, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah, Berikut Daftar Namanya



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangeruka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah

jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di Ruang Pola Kantor Guber-

nur Sultra.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sultra melantik sebanyak 17 pejabat pimpinan tinggi

Lanjut ke Hal: 7

Damkar, BPBD, Polres, PLN, Telkom Bersinergi Atasi Pohon Tumbang Berbahaya, Cuaca Ekstrem Picu Pohon Tumbang di Banyak Titik Baubau

ya menerima laporan warga melalui telepon pada pukul 10.16 WITA. Lokasi kejadian tepat berada di area sebelum Pertamina, Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.

“Laporan masuk pagi ini mengenai adanya pohon tumbang yang menutupi setengah bahu jalan. Selain menghambat akses kendaraan, pohon tersebut juga menimpa kabel lampu jalan,” ujarnya.

Muh Massad mengungkapkan, sebanyak 12 personel gabungan Damkar dan Rescue

segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Mengingat adanya kabel yang terdampak, tim di lapangan berkoordinasi erat dengan pihak terkait untuk menjamin keamanan proses evakuasi. Selain itu, ada sinergi Instansi dengan melibatkan tim teknis dari PLN dan Telkom untuk penanganan instalasi kabel yang tertimpa.

Sementara itu, mengingat kondisi cuaca yang saat ini memasuki musim hujan disertai angin kencang (badai), Kadis

Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi pohon tumbang di lingkungan sekitar.”Kami menghimbau masyarakat untuk melakukan pemangkasan mandiri terhadap pohon-pohon yang sudah rimbun atau rawan tumbang, terutama yang berada di dalam pekarangan rumah. Ini penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Ditempat yang lain,

Damkar dan Rescue bersama-sama dengan gabungan DLH, BPBD dan Polres juga tangani pohon tumbang di Baadia atas menuju Wabobo yang diback up DLH. Kemudian di depan SD7 Kadolomoko Bure dan di Tangani Tim BPBD bersama Polres Kota Baubau. Selanjutnya pohon juga tumbang di Bungi dan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan penebangan pohon juga di tangani damkar dan rescue dengan 1 armada L300.(*)

Bupati Buteng Azhari Serahkan 250 Pasang Seragam Pada BKMT dan Kelompok Majelis Taklim Nurul Yakin

merintah Kabupaten Buton Tengah dalam mendukung dan memakmurkan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Bupati Azhari menegaskan, seragam tersebut bukan sekadar bantuan fisik, melainkan simbol persatuan, kebersamaan, dan semangat dakwah.

“Majelis Taklim memiliki peran strategis sebagai benteng moral masyarakat.

Dengan mengaktifkan Majelis Taklim, kita sedang membangun pondasi spiritual yang kokoh bagi Buton Tengah,” ujar Bupati Azhari.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Azhari juga menyampaikan pesan penuh makna kepada para jamaah, khususnya kaum ibu, tentang pentingnya peran istri dan ibu dalam menjaga ketahanan keluarga. Ia mengajak para

ibu untuk senantiasa memperbanyak doa, menjaga kesabaran, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus daerah.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud rasa syukur dan harapan agar Buton Tengah senantiasa diberkahi dengan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.(*)

Sinergi Pemda Busel dan Batalion Lamaindo untuk Ketahanan Pangan, Naviruddin: Fish Finder dan Cold Storage, Masa Depan Baru Nelayan Busel

berfokus pada ketahanan pangan.

“Mereka bukan batalion tempur, tapi bisa membantu pembinaan disiplin nelayan serta mendukung program-program kami,” jelasnya.

Dalam hal pengembangan sektor perikanan, Nafiruddin menekankan dua aspek utama: budidaya dan penangkapan ikan. Budidaya udang menjadi salah satu fokus, namun tangkap tetap menjadi sektor penting.

“Nelayan di sini secara alami sudah memiliki kemampuan menangkap ikan, namun teknologi penangkapan dan akses pasar masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.

Nafiruddin menjelaskan, perbedaan antara nelayan yang

hanya mencari ikan dan nelayan yang menangkap ikan dengan teknologi modern, seperti penggunaan fish finder. Dengan teknologi ini, nelayan dapat menghitung jarak, lokasi, dan kebutuhan bahan bakar sebelum melaut, sehingga operasional menjadi lebih efisien.

“Kalau hanya menangkap ikan lalu dijual di pasar tradisional, pendapatan nelayan terbatas. Yang penting adalah membangun industri pengolahan agar nilai ikan meningkat, dan pembeli jelas,” katanya.

Program pengembangan ini juga mencakup penyediaan lahan untuk usaha pengolahan dan pengembangan kolstori.

“Kami siap menyiapkan lahan, namun

nelayan tetap membeli fasilitas yang ada. Untuk kolstori, kapasitas akan ditingkatkan sesuai kebutuhan,” ujar Nafiruddin.

Meski belum ada program kerja resmi, Nafiruddin menegaskan pentingnya perencanaan dan persiapan sejak dini.

“Kita harus punya mimpi besar, karena tanpa persiapan, program tidak akan berjalan. Yang penting adalah menyiapkan infrastruktur, SDM, dan kerja sama dengan pusat maupun pihak lain,” pungkasnya.

“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perikanan di Buton Selatan dapat menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tutup Nafiruddin.(*)

Pimpin Upacara HKN Perdana 2026, Sekda Baubau La Ode Darussalam Tekankan Disiplin dan Efisiensi

baubau juga menyoroti tingginya biaya operasional listrik di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan data, biaya listrik kantor mencapai Rp52 juta, dengan rincian khusus gedung pembangunan sebesar Rp33 juta. Karena itu, diminta kepada seluruh Kepala Bagian dan pimpinan OPD untuk melakukan penghematan listrik demi efisiensi anggaran. Serta memastikan AC dan lampu di setiap ruangan dimatikan jika tidak digunakan.

Sedangkan terkait isu keterlambatan gaji yang menjadi kere-

lahan ASN, La Ode Darus Salam meminta seluruh pegawai untuk bersabar dan tetap tenang. Pihaknya memastikan pemerintah tengah berupaya menyelesaikan kendala teknis agar gaji segera cair dalam waktu dekat.

Sekda Kota Baubau berpesan agar ASN tidak terpancing untuk berkomentar negatif di media sosial yang tidak sesuai fakta. “Saya berharap ASN Kota Baubau selalu menerapkan prinsip sharing dulu sebelum sharing. Jangan ikut-ikutan menulis hal yang bisa mem-

perkeruh suasana,” harapnya.

Sementara itu, menanggapi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang melanda Kota Baubau, Sekda Kota Baubau menginstruksikan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Beberapa titik rawan seperti pohon tumbang di dekat Ayam Goreng Silvana dan kawasan Penurunan Keraton harus segera ditangani untuk mencegah kecelakaan.

Menutup rangkaian upacara, Pemerintah Kota Baubau mem-

berikan apresiasi tinggi kepada putra daerah, Husni Uba, yang berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games. Apresiasi juga diberikan kepada seorang tenaga honorer di Rumah Jabatan Wali Kota yang turut berpartisipasi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.”Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya di Baubau untuk terus mengharumkan nama daerah dan bangsa di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (*)

Gubernur Sultra ASR Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi dan Fungsional, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah, Berikut Daftar Namanya

pratama dan 32 pejabat fungsional. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di Sultra.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa birokrasi tidak semata-mata soal struktur dan jabatan. Ia berharap para pejabat mampu menjadi teladan melalui integritas, kejujuran, serta kedisiplinan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan adalah

amanah, bukan keistimewaan,” tegas Gubernur.

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Haris Ranto, S.ST., M.Si., dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Mukhtar, S.Pd., M.Sc., dilantik sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Mahadir Muhammad, S.T., M.S.M., dilantik sebagai Kepala Biro

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Umikun Latifah, S.KM., M.Si., dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Ardiansyah, S.P., M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. dr. Andi Edy Surahmat, dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. dr. H. Sukirman, M.Kes., MARS., Sp.PA, dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas.

8. Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.

9. Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dilantik sebagai Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

10. Dr. Ir. H. Pahr Yamsul, M.Si., dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

11. Parinringi, S.E., M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.

12. Muhammad Nur Jaya, S.T., M.T., dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

13. Dr. Ir. Martin Effendi Patulak, M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

14. Dr. Drs. Rony Yakob, M.Si., dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

15. Dr. Ir. Sukan-to, T.A., M.SP., M.A., dilantik sebagai Kepala Dinas Perin-

dustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

16. H. Belli, S.E., M.Si., dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

17. Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain pelantikan, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada para pelaksana tugas (Plt.) kepala pada enam OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut:

1. dr. Agus Pur-

wo Hidayat, Sp.An., sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Jantung.

2. Tommy Putra Alamsyah, S.T., M.T., sebagai Plt. Kepala Dinas Cipta Karya.

3. Andi Syahrir, S.TP., M.Si., sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Pantja Widhia Justianus Tolia, S.T., M.T., sebagai Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

5. La Ode Mahbub, S.Sos., M.I.Kom., sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

6. Wawan Arianto, S.STP., M.Si., sebagai Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA).(*)

PDIP Usul E-Voting Pilkada, Pemerintah dan DPR Sepakat Akan Lakukan Kajian



DPR dan pemerintah mengaku terbuka terhadap usul PDIP soal penerapan e-voting atau pemilihan secara elektronik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)

Laporan: Hamid

JAKARFTA- DPR dan pemerintah mengaku terbuka terhadap usul PDIP soal penerapan e-voting atau pemilihan secara elektronik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai semua usul perbaikan dalam sistem pemilu harus didukung. Oleh karenanya, kata dia, pemerintah harus mengkaji setiap usulan tersebut.

“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya. Kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan kita itu jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo di kom-

pleks parlemen, Senin (19/1/2026).

Namun, dia menilai, aspek paling mendasar dalam sistem pemilu yang baik harus didasarkan kultur setiap negara. Sebab, sistem pemilu pada satu negara, tak selamanya cocok diterapkan negara lain.

Meski begitu, Pras menyebut baik pemerintah maupun DPR tetap harus memikirkan untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan.

“Tapi tujuannya itu, bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya

karakter bangsa kita,” katanya.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menilai usul penerapan e-voting sebagai hal yang baik. Namun, menurut Dasco, usul itu tetap perlu dikaji dengan matang.

“Nah itu satu yang bagus, tapi alat pengamanannya dari teknologi nya itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji,” katanya.

PDIP mengusulkan sistem e-voting sebagai solusi atas biaya pilkada yang dinilai mahal, alih-alih mengubah sistem pemilihan lewat DPRD. PDIP tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memilih calon kepala daerah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan gagasan ini sudah lama diinisiasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai Presiden kelima RI. Hasto menyebut gagasan Megawati itu bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.

“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ucapnya.(*)

Survei: 54,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran



JAKARTA-Hasil jajak pendapat arau survei Media Survei Nasional (Median) mencatat 54,5 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Survei ini merupakan survei pengguna media sosial. Pengambilan data pada 9 hingga 13 Januari dengan target sampel sebesar seribu responden.

“Nah, kita melihat bahwa waktu kita tanya Anda puas atau tidak dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum, itu kita bisa melihat ada 54,5% yang menyatakan puas,” kata Direktur Median, Rico Marbun dalam paparannya, Selasa (20/1).

Rico pun menjelaskan tiga besar alasan publik puas terhadap

kinerja pemerintahan secara umum. Program makan bergizi gratis (MBG) duduk di posisi pertama.

Ia menyampaikan sebanyak 12,6 persen responden mengaku puas karena keberadaan MBG.

Lalu di posisi kedua, responden juga mengaku puas dengan kinerja pemerintah karena pemberantasan korupsi, dengan angka 10,4 persen. Selanjutnya di posisi ketiga, responden yang menyatakan puas melihat bahwa pemerintah tengah berupaya memenuhi janji-janjinya (8,4 persen).

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas sebesar 41,3 persen. Dengan rincian tidak puas 30,5 persen dan sangat tidak puas 10,8 persen. Responden yang menyatakan tidak puas terhadap ki-

nerja pemerintah ini menyoroti janji lapangan kerja yang belum tercapai.

“Pertama itu adalah janji lapangan kerja belum tercapai. Jadi bisa kita lihat itu 16,7 persen ya. Jadi bisa kita lihat memasuki tahun baru di 2026 ini, ini sepertinya harapan publik atas lapangan pekerjaan atau kesulitan mereka terhadap lapangan pekerjaan ini mulai menguat,” kata dia.

Lalu di posisi kedua, responden menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintah karena penangan bencana yang dinilai kurang baik (13,3 persen).

“Kemudian yang ketiga itu orang mungkin melihat bahwa MBG ini menghabiskan uang dan kurang efisien,” ucapnya.(alwan)

Istana Respons Bupati Pati Sudewo dan Walkot Madiun Kena OTT KPK

JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi prihatin atas terjeratnya Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

“Tentunya kita prihatin, kembali terjadi OTT yang dilakukan oleh kepala daerah,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1).

Pras menyampaikan kasus ini harus menjadi alarm bagi semua pihak bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah.

Ia mengatakan

bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga berkali-kali menekankan untuk memerangi korupsi.

Kedua kepala daerah tersebut terjerat OTT KPK dalam waktu yang hampir bersamaan. Bupati Pati Sudewo diduga menerima sejumlah uang terkait penempatan perangkat desa.

Sementara Wali Kota Madiun Maidi terjerat dalam OTT terkait dugaan suap proyek dan dana CSR.

KPK lalu menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sude-

wo diduga menerima uang total Rp2,6 miliar.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Kemudian KPK juga menjerat Maidi tersangka pemerasan dengan modus dana CSR dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun.(alwan)

SBY Cemas Perang Dunia III Pecah, Situasinya Sama Jelang PD I dan II

Laporan: Alwan

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku khawatir soal potensi perang dunia (PD) ketiga pecah melihat situasi dan kondisi geopolitik baru-baru ini.

SBY menyebut perang dunia ketiga sangat mungkin terjadi, meski hal itu bisa dicegah. Namun, melihat perkembangannya saat ini dari hari ke hari, ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin kecil.

“Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit,” tulis SBY lewat akun X pribadinya, Senin (19/1).

SBY menyebutkan kondisi geopolitik saat ini memiliki banyak kesamaan menjelang



Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku khawatir soal potensi perang dunia (PD) ketiga pecah melihat situasi dan kondisi geopolitik baru-baru ini.

pecahnya perang dunia pertama (1914-1918) dan kedua (1939-1945).

Misalnya, dia menyebutkan, muncul pemimpin negara kuat yang ingin perang, pembentukan persekutuan negara-negara yang saling berhadapan, hingga pembangunan kekuatan mi-

liter dalam skala besar.

“Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,” ujar SBY.

Di sisi lain, SBY melihat banyak negara kini mulai abai

atau tak peduli untuk mencegah potensi perang meski indikasinya kuat terlihat. Beberapa alasan yang bisa menjawab hal itu mungkin karena mereka tak memiliki kekuatan, atau bahkan sudah tak peduli.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku kini ha-

nya bisa berdoa. Sebab, jika perang dunia pecah, perang total dan pedang nuklir sebagai sesuatu yang tak bisa dicegah.

“Banyak studi yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Kor-

ban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia,” ujar SBY.

SBY berharap PBB bisa mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk membahas satu agenda utama, yakni mencegah krisis dunia dalam skala

besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru.

“Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing,” tulis SBY.(*)

Pemprov Sultra Perkuat Program Benih Mandiri melalui Pembagian Benih Padi “Sanggoleo Sultra”



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat program benih mandiri sebagai upaya strategis dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut ditandai dengan panen perdana hasil perbanyakan benih padi serta pembagian benih padi gratis “Sanggoleo Sultra” kepada kelompok tani, yang dilaksanakan di Wawotobi, Kabupaten Konawe, Selasa (20/1/2026).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa program benih mandiri tidak hanya bertujuan menyediakan benih bagi petani, tetapi juga membangun ekosistem perbenihan yang kuat, berkelanjutan, berdaya tahan dan berpihak ke-

pada petani.

“Program benih mandiri ini bukan sekadar menghasilkan benih, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun ekosistem benih yang kuat, berkelanjutan, berdaya tahan, dan berpihak kepada petani,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sultra melalui UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, menjaga kemurnian serta kualitas genetik benih padi yang dikembangkan. Benih tersebut kemudian diperbanyak oleh para penangkar benih yang telah dibina secara berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani, seluruh proses perbenihan dikawal dan diawasi

secara ketat oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSTP).

“Pengawasan yang profesional dan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan benih yang sampai ke tangan petani adalah benih padi yang bermutu dan bersertifikat,” tegasnya.

Melalui mekanisme ini, Gubernur Sultra berharap petani tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh benih padi unggul yang sesuai dengan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat.

“Dengan benih unggul, kita berharap semoga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sekaligus dapat menumbuhkan perekonomian daerah,” kata Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sultra juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi

menyukseskan program benih mandiri, khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, para penangkar benih, penyuluh pertanian, serta kelompok tani.

Gubernur berharap panen perdana ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi serta memperluas jangkauan program benih mandiri ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

“Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung tercapainya swasembada pangan untuk kemandirian serta ketahanan pangan daerah dan nasional,” pungkasnya. (*)

Sekda Sultra Tekankan Pentingnya Kualitas Laporan Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2025

SULTRA, BP- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kendari, Senin (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja TPID Provinsi Sulawesi Tenggara serta TPID Kota Baubau, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna Barat yang berhasil meraih penghargaan pada ajang TPID Award 2025 sebagai TPID berkinerja terbaik dan berprestasi untuk wilayah Sulawesi.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas sinergi, kolaborasi, dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi di Sulawesi Tenggara. Namun, prestasi ini bukanlah titik akhir, melainkan pemacu untuk meningkatkan kinerja TPID agar semakin berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa TPID memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga

melalui penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yakni keterediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Seluruh upaya tersebut, kata dia, harus dilaporkan secara lengkap, akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam dokumen evaluasi kinerja TPID.

Asrun Lio menekankan bahwa laporan pengendalian inflasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, laporan TPID harus mampu menggambarkan kondisi inflasi daerah secara utuh melalui tiga aspek penilaian, yaitu aspek proses, output, dan outcome, yang mencakup perkembangan inflasi, stok komoditas strategis, hasil koordinasi TPID, program unggulan, hingga kegiatan stabilisasi harga.

“Kegiatan capacity building ini sangat strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam menyusun laporan berbasis data dan fakta lapangan, dengan narasi dan analisis yang siste-

matik, konsisten, serta mudah dipahami,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh TPID kabupaten/kota dalam melengkapi dokumen pendukung laporan sesuai ketentuan, agar proses evaluasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang konstruktif bagi perbaikan kinerja ke depan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D, serta dihadiri oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Rajab, serta peserta TPID kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Menutup sambutannya, Asrun Lio menyampaikan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atas sinergi dan pendampingan yang berkelanjutan dalam pengendalian inflasi, serta kepada Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Sekretaris TPID Provinsi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. (*)



Pimpin Apel Gabungan ASN, Gubernur Sultra Tekankan Efisiensi Anggaran dan Disiplin Aparatur

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/1/2026).

Dalam arahnya, Gubernur menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola anggaran yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat

disiplin dan integritas aparatur sebagai fondasi pelayanan publik.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas pengamanan yang telah menjaga stabilitas dan keamanan daerah selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra yang terus meningkat harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran pemerintah harus menjadi stimu-

lus yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka ekonomi masyarakat juga harus ikut meningkat. Anggaran pemerintah harus menjadi stimulus yang efektif,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan alokasi yang tidak sesuai di sejumlah sektor, sehingga ia meminta seluruh OPD untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran.

“Pengelolaan anggaran harus tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi pemborosan.

Semua kegiatan harus berjalan sesuai instruksi dan disposisi gubernur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti beban belanja pegawai yang dinilai belum seimbang. Dari sekitar 23 ribu ASN, beban gaji yang awalnya diproyeksikan Rp1,6 triliun, ternyata melebihi Rp1,7 triliun. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius di tahun 2026.

“Tahun 2026 ti-

dak boleh terjadi lagi. Jika kita bisa melakukan efisiensi dan tepat sasaran, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) dapat diberikan secara adil,” tuturnya.

Memasuki aspek makro ekonomi daerah, Gubernur memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,4 persen. Ia meminta agar capaian ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan di tahun 2026.

Sementara itu, inflasi tahunan Sultra tercatat sebesar 2,86

persen, lebih rendah dari angka nasional 2,92 persen. Pada Desember 2025, inflasi Sultra bahkan hanya 0,22 persen, menjadi salah satu yang terendah secara nasional.

Di bidang pengelolaan keuangan, realisasi penyerapan anggaran OPD Pemprov Sultra tahun 2025 mencapai 88,99 persen. Gubernur menargetkan pada tahun 2026, seluruh OPD harus mampu meningkatkan serapan di atas 95 persen agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Sebagai langkah percepatan, ia menginstruksikan seluruh OPD untuk segera

melaksanakan kegiatan sejak Triwulan I Tahun 2026. Khusus bagi OPD penghasil PAD, diminta lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai respons terhadap pengurangan dana transfer pusat di tahun 2026.

Menutup arahnya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan komitmen pelayanan publik demi mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara. (*)

Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Pesta Panen Desa Wakeakea



Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari bersama Wakil Bupati Muh. Adam Basan, S.Sos menghadiri pesta panen Desa Wakeakea yang berlangsung di Gedung Kesenian Desa Wakeakea, Kecamatan GU, Sabtu (10/1/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Buton Tengah Samirun dan Norman, Staf Ahli TP-PKK Buton Tengah Kartini Adam Basan, Kepala Dinas PUTR, Camat GU, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan GU.

Dalam sambutannya, Bupati Azhari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Desa Wakeakea yang konsisten melestarikan tradisi syukuran panen. Menurutnya,

pesta panen bukan sekadar seremoni, melainkan wujud rasa syukur dan ikhtiar bersama untuk meraih keberhasilan.

“In sya Allah, tradisi panen ini harus terus dilestarikan. Jika memungkinkan, akan kita masukkan dalam kalender event kebudayaan daerah sebagai bentuk doa dan rasa syukur, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Menanggapi keluhan petani terkait serangan hama yang memengaruhi hasil pertanian, Bupati Azhari memberikan instruksi tegas kepada dinas terkait. Ia meminta Dinas Pertanian segera turun tangan memberikan solusi, baik melalui penyediaan obat pembasmi hama maupun pendampingan dan penyuluhan.

“Kita harus memadukan doa dan ikhtiar,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, Bupati Azhari bersama Wakil Bupati Adam Basan juga menegaskan komitmen untuk merealisasikan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Desa Wakeakea.

“Masalah jalan akan kami upayakan semaksimal mungkin karena ini merupakan bagian dari janji kami untuk memberikan perhatian khusus bagi Desa Wakeakea,” kata Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan rencana strategis pengembangan potensi wisata dan pertanian melalui pilot project yang mengintegrasikan situs sejarah dan pertanian. Setelah uji coba di salah satu benteng di

Mawasangka, konsep serupa direncanakan diterapkan di Kecamatan GU, tepatnya di Benteng Daduwali Ombonawulu, guna memaksimalkan hasil pertanian sekaligus menghidupkan potensi wisata daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Rumpun Ombonawulu atas dukungan yang dinilai sangat vital dalam pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Labungkari sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah daerah, lanjut Bupati, akan terus meningkatkan pelayanan publik dan memprioritaskan putra daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan. (*)

Panen Perdana Budidaya Udang di Desa Wowonga Jaya, Wakil Bupati Butur Apresiasi Terobosan Hasil Karya Masyarakat Setempat



Laporan: Kasrun

BUTUR, BP-Panen perdana budidaya Udang Vannamei oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Rahman, S.K.M., M.Kes., pada Jumat (16/1/2026).

Panen perdana tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Sahrn Akri, SP., M.Si., dan Kepala BPBD Butur Made Alwi, SH., bertempat di lokasi budidaya udang yang dikelola oleh Bumdes Jaya Mandiri Wowonga Jaya.

Wakil Bupati Butur Rahman, mengapresiasi

upaya masyarakat dan pemerintah desa setempat, sebab panen perdana Udang Vannamei tersebut merupakan bentuk terobosan hasil karya warga di desa yang anggarannya bersumber dari penyertaan modal melalui program ketahanan pangan desa.

Selain usaha sektor pertanian dan perikanan kelautan, tentu budidaya udang juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan desa, sehingga berpotensi memakmurkan warga. Jelasnya.

Menurutnya, panen perdana ini salah satu keberhasilan pembangunan desa yang dapat

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan.

Harapannya, Budidaya udang Vannamei yang digeluti masyarakat dan pemerintah desa Wowonga Jaya perlu ditingkatkan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk diketahui, hasil tangkapan perdana berjumlah 700 kg, bersumber dari 6 kolam dengan diameter 5 meter, serta masa panen selama 75 hari.

Selanjutnya, Panen perdana ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan udang dalam tambak sehingga mendorong pertumbuhan udang lebih cepat. (*)

Wakil Bupati Butur Ajak Masyarakat Untuk Hidup Sehat Dengan Senam Jantung Sehat dan PHBS.

BUTUR, BP-Wakil Bupati Buton Utara Rahman, S.K.M., M.Kes. Menghadiri Rakerda I Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara dengan Tema 'Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Kesehatan Jantung Melalui Senam Jantung Sehat dan PHBS,' yang bertempat di Pantai Membuku Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Minggu (18/1/2026).

Kegiatan Rakerda ini dirangkaikan dengan senam jantung sehat yang diikuti oleh pengurus dan anggota YJI Cab. Buton Utara sebagai bentuk kampanye

gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buton Utara mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. Ia menekankan bahwa penyakit jantung dapat dicegah melalui pola hidup sehat, rutin berolahraga, serta penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya menjaga kesehatan jantung tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung

jawab bersama. Melalui kegiatan seperti senam jantung sehat dan edukasi PHBS, kita harapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup sehat,” ujar Wakil Bupati Rahman.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara atas inisiatif dan komitmennya dalam mendukung program pemerintah daerah di bidang kesehatan. Ia berharap Rakerda ini dapat menghasilkan program kerja yang konkret, berkelanjutan, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Kasrun)

Pemkab Buton Tengah Gelar Apel Gabungan OPD, Tekankan Disiplin dan Integritas ASN

Pewarta: Kamarudin

BAUBAU, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di halaman Kantor Bupati Bumi Praja Labungkari, Senin (12/1/2025).

Apel gabungan tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Armin, S.Pd., M.Si. Dalam arahannya, Armin menekankan pentingnya



ya disiplin kerja bagi seluruh ASN, mulai dari kedisiplinan kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, hingga disiplin berpakaian sesuai dengan aturan pakaian dinas yang telah ditetapkan.

Selain disiplin, Armin juga menyoroti pentingnya integritas sebagai nilai utama bagi seorang ASN. Menurutnya, integri-

tas merupakan penentu harga diri seorang aparatur negara, yang tercermin dari komitmen terhadap tugas yang diberikan, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

“Integritas adalah cerminan jati diri ASN. Sejauh mana komitmen kita terhadap tugas dan tanggu-

ng jawab yang diberikan oleh pimpinan, itulah yang menentukan kualitas kita sebagai pelayan publik,” ujar Armin.

Lebih lanjut, Armin juga menyampaikan agenda kegiatan Safari Dakwah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Januari 2025. Ia mengimbau kepada seluruh ASN yang tidak se-

dang melaksanakan pelayanan publik agar dapat mengikuti kegiatan tersebut. Safari Dakwah akan dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Lakudo

pada 13 Januari, dan dilanjutkan pada 14 Januari 2025 di Kecamatan Mawasangka.

Apel gabungan ini diharapkan dapat meningkatkan kedi-

siplin, integritas, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. (*)

Gubernur Sultra Hadiri Peresmian 166 Sekolah Rakyat, Presiden Tekankan Kolaborasi Pusat-Daerah Putus Rantai Kemiskinan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Sekolah Rakyat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Peresmian Sekolah Rakyat dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari komitmen nasional memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dalam laporan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, disampaikan bahwa Sekolah Rakyat saat ini tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan total 166 titik. Program ini menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga pendidik dan kependidikan.

Para peserta didik

berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi sangat rentan, di mana mayoritas orang tua bekerja sebagai buruh, berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, dan memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.

“Sekolah Rakyat dirancang tidak seperti sekolah biasa, melainkan sebagai ekosistem terpadu yang mencakup perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan. Pendekatan ini diperkuat melalui pendidikan berasrama, pembinaan karakter, penegakan kedisiplinan, serta pengembangan potensi peserta didik berbasis tes DNA talent,” terang Mensos RI.

Disebutkan pula bahwa sejumlah Sekolah Rakyat telah beroperasi selama empat hingga enam bulan sebelum diresmikan dan menunjukkan perubahan positif pada peserta didik, baik dari segi fisik maupun akademik mereka.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo

Subianto menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita harus berani melihat kekurangan kita. Pertumbuhan harus disertai dengan pemerataan. Tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, sekaligus menjadi jembatan masa depan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Sekolah Rakyat ini adalah jembatan masa depan bagi anak-anak sulit sekolah dan tidak punya harapan,” katanya.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk para menteri, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri, yang dinilai berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

“Saya melihat hari ini kita buktikan, peranan para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI dan Polri, serta dukungan semua pihak, sangat menentukan. Kita buat bersama sehingga anak-anak kita hari ini punya harapan,” ucap Presiden.

Kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara dalam peresmian ini mencerminkan dukungan penuh pemerintah daerah Sulawesi Tenggara terhadap kebijakan nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun sumber daya manusia unggul serta berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Kemenkes Awasi Mutu MBG untuk 55,1 Juta Penerima Manfaat per Hari



J A K A R - T A - P r o g r a m Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjangkau 55,1 juta penerima manfaat per hari, melonjak signifikan dari target awal 6 juta orang. Seiring peningkatan cakupan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmennya dalam mengawal mutu dan keamanan pangan agar makanan yang dibagikan tetap aman, layak, dan higienis.

Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan bahwa peran utama Kemenkes dalam pelaksanaan program MBG adalah pengawasan, khususnya terhadap standar keamanan pangan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Jadi kami dari Kementerian Kesehatan punya tugas adalah penga-

wasan,” ujarnya dalam konferensi pers di SMKN 1 Jakarta (8/1).

Pengawasan dilakukan melalui kerja sama program MBG dengan dinas kesehatan di daerah, yang bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. Salah satu instrumen utama pengawasan tersebut adalah sertifikasi laik higienis dan layak dikonsumsi bagi dapur SPPG.

“Maka keluarlah sertifikat untuk layak dimakan dan higienis,” jelas dr. Benjamin, yang akrab disapa dr. Benny.

Hingga saat ini, sebanyak 4.535 SPPG telah dinyatakan lulus sertifikasi. Artinya, seluruh proses mulai dari kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga pemeriksaan laboratorium telah melalui tahapan evaluasi menyeluruh oleh Kemenkes.

Ia menegaskan

tidak semua dapur dapat langsung memperoleh sertifikat. Dapur yang belum memenuhi standar diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Melalui pengawasan tersebut, Kemenkes memastikan 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Capaian tersebut disebut dr. Benny sebagai langkah luar biasa dalam perjalanan MBG menuju target nasional 82 juta penerima manfaat.

“Kalau kita melihat angka-angka pelayanan hari ini 55,1 juta, baik anak sekolah maupun ibu-ibu hamil, ini suatu hal yang luar biasa dari target 82 juta target dari-pada MBG ini,” ucapnya. (*)



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Amat Jr
Korlip: Noval
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: Rahim
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Capai Rp300 Triliun



Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp300,86 triliun sepanjang 2025. Arsip Kejaksaan Agung

Laporan: Amran

JAKARTA-Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp300,86 triliun sepanjang 2025.

“Total kerugian negara yang terimplikasi dalam korupsi TPPU mencapai Rp300,86 triliun,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Selasa (20/1).

Meski begitu, dia menyebut Kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam bidang tindak pidana khusus yang

mencapai Rp24,71 triliun. Jumlah itu belum termasuk jumlah valuta asing sebesar USD11,29 juta, SGD26,4 juta, dan Â£57,2 ribu.

Lalu, ada pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang juga dari bidang tindak pidana khusus senilai Rp19,12 triliun.

Namun, Burhanuddin mengingatkan angka penyelamatan keuangan negara dalam tindak pidana khusus masih bersifat sementara selama proses hukum yang meliputi pemblokiran, penyitaan, hingga pengalihan

aset. Penyelamatan uang negara, kata dia, baru akan bersifat permanen setelah ada putusan pengadilan.

“Pemulihan kerugian negara secara permanen baru terwujud setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan perampasan aset hasil kejahatan untuk disetor ke kas negara,” katanya.

Sementara, dalam jumlah kasus, Burhanuddin mengungkapkan pihaknya menerima 4.748 aduan masyarakat dalam kasus korupsi dan TPPU. Dari jumlah

itu, kasus yang berhasil dikembangkan sebanyak 4.131 perkara, dan 1.590 di antaranya masuk ke penuntutan.

Sedangkan, dalam kasus tindak pidana kepabeanaan, pajak, cukai, dan TPPU yang masuk ke penuntutan sebanyak 562 perkara, dan masuk eksekusi 221 perkara.

“Penanganan perkara-perkara tindak pidana khusus seperti korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana perpajakan menunjukkan aktivitas penegakan hukum yang signifikan,” ujar Burhanuddin.(*)

Tangan Diborgol, Wali Kota Madiun Bungkam saat Ditahan KPK

Laporan: Amran

JAKARTA-Wali Kota Madiun Maidi memilih bungkam saat dibawa keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju mobil tahan, Selasa (20/1) malam.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Maidi dibawa keluar sekitar pukul 21.27 WIB. Maidi telah memakai rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol.

Maidi yang sudah menyandang status tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi itu berjalan bersama dua tersangka lain, yakni Rochim Ruhdiyanto selaku orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Maidi tak menjawab satu pun pertanyaan wartawan yang menunggunya di depan pintu keluar. Ia terus berjalan dengan



Wali Kota Madiun Maidi memilih bungkam saat digelandang keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju mobil tahan, Selasa (20/1/2025) malam.

pengawasan petugas KPK.

Maidi terus berjalan hingga masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Maidi dan dua tersangka itu ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK menjerat Maidi sebagai tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi.

Ada dua tersangka lain, yakni orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

Maidi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Pertama terkait pemerasan dengan modus dana CSR dari Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350 juta.

Kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba.

Selain itu ada dugaan penerimaan sekitar Rp200 juta terkait fee pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar.

Kader Demokrat Dicecar 28 Pertanyaan Terkait 4 Akun soal Ijazah Jokowi



Penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya memeriksa Kepala BHPP DPP Partai Demokrat Muhajir terkait laporan terhadap empat akun media sosial (medsos) yang menuding Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (20/1).

Laporan: Hadi

JAKARTA-Penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya memeriksa Kepala BHPP DPP Partai Demokrat Muhajir terkait laporan terhadap empat akun media sosial (medsos) yang menuding Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (20/1).

Kuasa hukum Muhajir, Rusdi mengatakan kliennya diperiksa dalam kapasitas sebagai pelapor. Pemeriksaan terhadap Muhajir berlangsung sejak pukul 10.30 WIB sampai 17.30 WIB.

“Pertanyaan tadi ada 28 pertanyaan,” kata Rusdi di Polda Metro Jaya.

Rusdi menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan objek perkara di mana empat akun media sosial itu menyebutkan bahwa beredarnya isu ijazah palsu Jokowi didalangi SBY. Terlebih, Roy Suryo yang berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini sempat menjadi politikus Partai Demokrat.

“Selama ini Pak Roy Suryo dan teman-teman yang mengatakan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi dan kita dikait-kaitkan yang sama sekali yang kami dengan te-

gas menyatakan tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali,” ujarnya.

Rusdi mengatakan pihaknya bakal mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa oleh penyidik terkait laporan ini. Namun, Rusdi belum memberikan soal identitas kedua saksi tersebut.

“Saksi ada dua dan belum ditentukan jadwal pemanggilannya,” ucap dia.

Sementara itu, Muhajir menuturkan sejak 2020 Roy Suryo sudah keluar dari struktur Partai Demokrat. Karenanya, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Roy Suryo tidak terkait sama sekali dengan Partai Demokrat.

“Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Suryo dan kawan-kawan itu adalah murni perjuangan yang dia lakukan sendiri. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat,” ucap dia.

Lebih lanjut, Muhajir mengatakan partainya memiliki hak untuk meluruskan tuduhan yang dialamatkan kepada SBY tersebut. Apalagi, jalur somasi kepada para akun tidak mendapat respon.

“Namun, ternyata hal tersebut disampaikan di hadapan publik yang menyerang kehormatan dan martabat Pak SBY maupun Partai Demokrat dengan berita-berita hoax

tersebut, tentunya menjadi kurang bagus di mata publik,” katanya.

Sebelumnya, Badan Hukum Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial (medsos) yang menuding Ketua Majelis Tinggi mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Empat akun media sosial yang dimaksud yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sud-irowibudhiusmp.

LaporanLaporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan tercatat lewat LP bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB.

“Benar, ada laporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (6/1). (*)

KUHP.

Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Tharuq disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.(*)

“KPK turut menemuken dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK,

Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers, Selasa (20/1/) malam.

Atas perbuatannya, terhadap Maidi dan Rochim disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21UU No.1 tahun 2023 tentang

Pengembangan Pelabuhan Murhum, Pemkot dan DPRD Kunker di KSOP



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Dalam rangka pengembangan kawasan pelabuhan murhum Baubau, Pemerintah dan DPRD Kota Baubau melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau pada Jumat (10/01/2026).

Dalam keterangan persnya, anggota DPRD Kota Baubau Muh. Ahadyat Zamani, S.T., M.T, mengatakan, Kunker DPRD bersama Pemkot Baubau di Pelabuhan Murhum intinya adalah ingin mendengarkan secara langsung dari pihak yang berkepent-

ingan tentu dalam hal ini KSOP Pelabuhan Murhum Kota Baubau terkait dengan rencana pengembangannya.

Termasuk juga point-point yang bisa dikerjasamakan dengan Kota Baubau agar bisa menjadi salah satu katakanlah sumber pemasukan untuk kas daerah. "Nanti juga kita lihat kerjasamanya dalam bentuk apa tentu akan dirumuskan nanti sesuai regulasi yang ada,"katanya.

Ditempat yang sama, Kadis Perhubungan Arlis, S.Pd., M.Pd mengungkapkan, pemerintah pada dasarnya selalu ada untuk memastikan masyarakatnya setiap beraktifitas selalu nyaman dan aman un-

tuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, setiap sudut ruang ataupun soal yang mau diselesaikan harus cepat di selesaikan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait dan ketika sudah terbuka beroperasi maka akses kontainer itu sudah betul-betul nyaman tidak lagi mengganggu aktivitas naik turunnya penumpang.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Baubau Taher Laetupa, S.T., M.T membeberkan rencananya kedepan untuk pengembangan Pelabuhan Murhum Baubau dimana untuk depo container pelabuhan akan diperluas serta di reklamasi.

Sedangkan untuk jalur lalu lintas container akan dipisahkan dengan penumpang yang nantinya akan dibukakan akses pintu masuk dan keluar di pintu barat dan timur. Sedangkan arus lalu lintas dari arah pantai kamali selain tujuan dermaga akan belok di jalan RA.Kartini.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir pada Kunker yakni perwakilan Pemkot Kadis Perindag H La Ode Ali Hasan,SE, M.Si. Kemudian anggota DPRD Kota Baubau La Ode Abdul Tamin, S.H., M.H, Hj Ratna, S.pd.,M.Pd, Noor Gemilang Siradja, S.IP, Zanihu, S.T, dan Drs. Nasiru.(*)

Peringati Isra Mi'raj 1447 H, Wali Kota Baubau Ajak Warga Perkuat Harmoni dalam Keberagaman

Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan penuh khidmat di masjid Jamiatul Sholihin Jumat Sore (16/01/2026).

Dalam acara yang dihadiri oleh Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin, ST, unsur Forkopimda, Pejabat Eselon II, III, IV lingkup Pemkot Baubau, Batalyon TP 823 Raja Wakaaka, Kepala Sekolah, dan tokoh agama tersebut, Wali Kota Baubau yang diwakili Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi di tengah keberagaman budaya yang ada di "Bumi Syara Pataanguna".



"Mengusung tema "Mempererat Tali Silaturahmi dan Harmoni dalam Keberagaman Budaya Kota Baubau", Wali Kota menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi'raj bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai ketaatan dan hubungan antar manusia.

"Warisan leluhur kita telah mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan kekayaan yang memperkuat pondasi sosial. Mari kita jadikan momentum ini untuk menghubungkan hati antar sesama warga," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Baubau menggaris-

bawahi tiga poin penting yang menjadi panggilan bagi seluruh lapisan masyarakat Baubau yakni saling Menghargai dengan menerapkan nilai keislaman sebagai rahmatan lil 'alamin. Kemudian, menjaga Kerukunan yakni tetap bersatu dalam bingkai kebersamaan meski berbeda suku dan tr-

Rakerwil Kemenag Sultra di Baubau, Momentum Strategis Maksimalkan Kebijakan dan Program



Laporan: Ardi

B A U B A U , BP-Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Baubau pada Kamis dan Jumat (8-9 Januari 2026) merupakan momentum strategis untuk memaksimalkan kebijakan dan program kerja strategis Kementerian Agama untuk memajukan pembangunan umat dan masyarakat khususnya di bumi anoa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukan pada Rakerwil Kemenag Provinsi Sultra tahun 2026 yang digelar di satu villa di Kota Baubau pada Kamis malam (08/01/2026).

Menurut orang nomor satu di bumi anoa ini, sebagaimana diketahui bersama bahwa di era saat ini tantangan pembangunan umat dan masyarakat makin kompleks. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi tema yang di usung pada Rakerwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang merujuk secara langsung pada spirit dan acuan pelaksanaan program

dalam Rakernas Kemenag RI tahun 2026 yaitu mempersiapkan umut masa depan. Tema ini mengajak untuk melakukan perencanaan program pembangunan keagamaan yang visioner, adaptif dan berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman dengan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia inivasi dan kreatifitas dan pemahaman agama yang relevan bagi generasi muda yang menekankan otonomi dan pilihan personal.

Andi Suman-gerukka berharap melalui Rakerwil, Kemenag Provinsi Sultra dan satuan kerja Kemenag yang ada di 17 Kabupaten/ Kota sebagai bagian penting dari komponen pembangunan Sulawesi Tenggara dan dapat terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparaturnya serta penataan organisasi yang selalu di landasi komitmen kerja secara profesional agar program bisa berjalan dengan baik demi mendukung pembangunan daerah dan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu Ka Kanwil Kemenag Sultra H Mansur mengungkapkan,

Rakerwil di Kota Baubau tahun 2026 adalah suatu penguatan didalam tema-tema Rakernas dan pada intinya di daerah ingin mewujudkan 8 program asta protas yang telah di canangkan oleh Menteri Agama RI. Sehingga dari 8 program asta protas ini bagaimana mengimplementasikan di daerah. Maka Rakorwil ini bisa bergerak lincah, adaptif, meningkatkan layanan umat yang berkualitas didalam bidang ke agamaan dan pendidikan. Selain itu juga, untuk mewujudkan layanan yang adaptif dan lincah juga melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga di luar Kementerian Agama yang juga sudah memberikan masukan agar organisasi ini bisa bergerak dengan lincah.

Pada kesempatan tersebut, pada Rakerwil Kemenag Provinsi Sultra turut dihadiri Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar, MA , Ketua DPRD Sultra, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE, Bupati Buton Selatan H Muh Adios, Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.(*).

adisi. Serta Gotong Royong untuk membangun Kota Baubau dengan semangat kekeluargaan tanpa memandang latar be-

lakang. Di akhir sambutannya, Wali Kota Baubau juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap isu-isu yang

berpotensi memecah belah dan terus memelihara sikap toleransi demi mewujudkan Baubau yang maju dan sejahtera.(*)